



# Jurnal Penelitian Politik

Vol. 15, No. 2, Desember 2018

## KONSTELASI POLITIK DI TAHUN ELEKTORAL

- Koalisi “Nano-Nano” Pilkada Serentak 2018
- Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal
- Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama terhadap Preferensi Politik Warga Banten pada Pilgub 2017
- Pilkada, Peran Partai Politik, dan Konstelasi Pragmatis: Kajian atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim (2017-2018)
- Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019
- Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi
- Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia
- *Marketing Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018*

### RESUME PENELITIAN

- Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung
- Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi

### REVIEW BUKU

- Mitos dan Realita Perempuan dalam Pemilu: Pelajaran dari Situasi Politik Amerika di Era Polarisasi Politik



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

**Mitra Bestari**

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)  
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)  
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)  
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)  
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)  
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)  
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)  
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)  
Ratna Shofi Inayati, MBA (*ASEAN dan politik luar negeri*)

**Penanggung Jawab  
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Esty Ekawati, S.IP., M.IP

**Dewan Redaksi**

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)  
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)  
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

**Redaksi Pelaksana**

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)  
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

**Sekretaris Redaksi**

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si  
Yusuf Maulana, SAP

**Produksi dan Sirkulasi**

Adiyatnika, A.Md  
Prayogo, S.Kom  
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

**Alamat Redaksi**

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: [penerbitan.p2p@gmail.com](mailto:penerbitan.p2p@gmail.com)  
Website: [www.politik.lipi.go.id](http://www.politik.lipi.go.id) | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

**ISSN**

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

# Jurnal Penelitian



Vol. 15, No. 2, Desember 2018

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	i
<b>Catatan Redaksi</b>	iii
<b>Artikel</b>	
• <b>Koalisi “Nano-Nano” Pilkada Serentak 2018</b>	
Moch. Nurhasim	129–142
• <b>Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal</b>	
Lili Romli	143–160
• <b>Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama terhadap Preferensi Politik Warga Banten pada Pilgub 2017</b>	
Agus Sutisna dan Idil Akbar	161–178
• <b>Pilkada, Peran Partai Politik, dan Konstelasi Pragmatis: Kajian atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim (2017-2018)</b>	
Firman Noor	179–196
• <b>Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019</b>	
Ridho Imawan Hanafi	197–213
• <b>Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi</b>	
Sri Budi Eko Wardani	215–231
• <b>Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia</b>	
Sri Yanuarti	233–248
• <b>Marketing Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018</b>	
M. Fajar Shodiq Ramadlan dan Romel Masykuri	249–265
<b>Resume Penelitian</b>	
• <b>Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung</b>	
Kurniawati Hastuti Dewi, dkk	267–288
• <b>Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi</b>	
Aisah Putri Budiatri, dkk	289–306
<b>Review Buku</b>	
• <b>Mitos dan Realita Perempuan dalam Pemilu: Pelajaran dari Situasi Politik Amerika di Era Polarisasi Politik</b>	
Mouliza K.D Sweinstani	307–317
<b>Tentang Penulis</b>	319–320
<b>Pedoman Penulisan</b>	321–325

## CATATAN REDAKSI

Konstelasi politik menjelang tahun elektoral menjadikan dinamika politik baik di tingkat nasional maupun lokal menarik untuk dikaji.

*Jurnal Penelitian Politik* nomor ini menyajikan 8 artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan isu elektoral. Artikel pertama berjudul “Koalisi Nano-Nano Pilkada Serentak 2018” yang ditulis oleh Moch. Nurhasim. Artikel ini membahas tentang Pilkada serentak 2018 yang menghasilkan pola koalisi yang tidak berubah dari pilkada-pilkada sebelumnya dan bahkan menjadi pola yang berulang. Koalisi nano-nano adalah sebuah koalisi yang variatif, campuran koalisi ideologis antara partai yang berideologi nasionalis-religius dengan berbagai pola pertarungan yang bisa berbeda-beda. campuran koalisi seperti itu pun tidak sama atau linear antara pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dengan pola koalisi pada Pilkada Bupati/Wakil Bupati--Walikota/Wakil Walikota. Akibatnya, intra-koalisi sendiri terjadi kompetisi yang tidak sehat. Pola koalisi yang muncul cenderung lebih pada ukuran jumlah partai dan kursi partai sebagai konsekuensi syarat mengusung calon yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

Artikel kedua ditulis oleh Lili Romli, ”Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal”, memperlihatkan tentang fenomena munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Para calon tunggal tersebut sebagian besar menang dalam pemilihan kepala daerah, hanya calon tunggal di Kota Makassar yang mengalami kekalahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal, yaitu pragmatisme partai politik; kegagalan kaderisasi, persyaratan sebagai calon yang semakin berat, dan “mahar politik” yang semakin mahal. Kemenangan para calon tunggal dalam pilkada tersebut bisa menghambat proses demokrasi lokal karena mekanisme check and balances tidak berjalan.

Artikel berikutnya ditulis oleh Agus Sutisna dan Idil Akbar berjudul “Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama Terhadap Preferensi Politik Warga Banten Pada Pilgub 2017” membahas mengenai kasus penistaan agama oleh Ahok sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta telah melahirkan dampak elektoral terhadap Pilgub Banten 2017 berupa terjadinya perubahan preferensi politik warga Banten. Pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief yang diusung oleh koalisi PDIP, Nasdem dan PPP, yang semula mendapat dukungan luas dari masyarakat karena dianggap merepresentasikan semangat perubahan untuk keluar dari jeratan dinasti politik keluarga Ratu Atut Chosiyah yang korup, secara perlahan mengalami degradasi dukungan seiring dengan pemberitaan negatif seputar kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang secara terus menerus mengalami perluasan dan penajaman hingga memasuki masa tenang Pilkada.

Artikel keempat yakni “Pilkada, Peran Partai dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim Tahun 2017-2018” ditulis oleh Firman Noor. Artikel ini membahas beberapa fenomena yang mengindikasikan adanya kondisi negatif dari eksistensi partai politik terkait dengan pilkada. Fenomena ini adalah tidak hadirnya sosok kepala daerah yang merupakan pimpinan partai di daerah itu, masih kuatnya peran jaringan non-partai dalam kontestasi politik, hingga dominasi pragmatisme dalam menentukan koalisi yang kerap menyingkirkan idealisme atau ideologi partai yang secara keseluruhannya memperlihatkan kerentanan partai di Indonesia. Tulisan ini menunjukkan hal-hal yang menyebabkan itu semua. Selain itu tulisan ini menawarkan beberapa solusi agar berbagai kelemahan itu dapat teratasi dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kualitas pilkada di kemudian hari.

Artikel selanjutnya membahas tentang “Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019” yang ditulis oleh Ridho Imawan Hanafi. Artikel ini membahas mengenai kemunculan dan tantangan partai politik baru pada Pemilu 2019 dengan menelaah ideologi-program, basis dukungan, dan kepemimpinan. Partai baru muncul sebagai alternatif pilihan politik yang berbeda dari partai lama yang sudah ada. Partai politik baru ini bisa mendapatkan simpati dari pemilih yang menginginkan kebaruan dalam kepartaian. Partai-partai baru membawa corak nasionalis dengan kecenderungan program yang tidak jauh berbeda dari partai baru lain. Antara satu partai dan lainnya basis dukungan masih cair dan bisa saling memperebutkan pasar pemilih.

Sementara itu, artikel “Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi” yang ditulis oleh Sri Budi Eko Wardani yang membahas mengenai Sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan sejak Pemilu 2009 membawa perubahan dramatis pada hubungan representasi politik pasca-Orde Baru. Terjadi perubahan dalam persepsi wakil terhadap konstituen dari sekadar formalitas menjadi politis untuk kepentingan pemilu berikutnya. Persepsi terhadap konstituen memengaruhi tindakan wakil di daerah pemilihan. Tulisan ini fokus pada persepsi wakil terhadap konstituen di tingkat lokal era reformasi, dengan studi kasus Anggota DPRD Banten 2014-2019, serta menggunakan teori lingkaran konsentrik konstituensi dari Richard Fenno, dan teori representasi yang merujuk pada Hanna Pitkin.

Artikel yang ditulis oleh Sri Yanuarti berjudul “Militer dan Pemilu-pemilu di Indonesia” membahas mengenai keterlibatan sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan menjadi kandidat kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun dalam pemilihan presiden atau sekedar menjadi tim pemenangan para kasus kandidat presiden. Jumlah mereka yang mencoba keberuntungannya berkariernya di bidang politik dari pemilu ke pemilu semakin banyak meskipun untuk itu terkadang mereka harus mengorbankan profesinya. Tulisan ini mencoba menganalisa, bagaimana TNI menerjemahkan posisi mereka

dalam politik pada masa demokrasi, khusus pada pemilu-pemilu di Indonesia, strategi apa yang dimainkan oleh militer untuk menopang kepentingan politiknya, bagaimana dampak peran tersebut terhadap konsolidasi dan profesionalisme politik.

Artikel terakhir yakni ditulis oleh Fajar Shodiq Ramadlan dan Romel Masykuri berjudul “Marketing Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018” membahas mengenai isu agama yang menjadi salah satu instrumen strategis dalam kontestasi pemilu di Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagai bagian dalam pembentukan perilaku memilih, sentimen dan isu agama muncul dan digunakan di 7 pilkada sepanjang 2015-2018.

Selain delapan artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2017. Naskah pertama ditulis oleh Kurniawati Hastuti Dewi, “Modal, Strategi Dan Jaringan Perempuan Politisi Dalam Kandidasi Pilkada Langsung”. Tulisan ini menyoroti bagaimana pentingnya tahap kandidasi melalui jalur partai politik, sebagai pintu masuk yang harus dapat ditembus oleh politisi perempuan untuk maju dalam Pilkada langsung. Melalui analisis mendalam terhadap dua perempuan politisi di Grobogan dan Lampung Timur, buku ini menggarisbawahi pentingnya tiga hal yaitu modal berupa modal individu dan modal sosial, strategi, dan jaringan yang harus dimiliki dan mampu dimainkan oleh perempuan politisi untuk dapat dicalonkan dalam Pilkada langsung.

Naskah kedua, “Personalisasi Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi”, ditulis oleh Aisah Putri Budiatri. Tulisan ini membahas mayoritas partai politik di Indonesia pada era reformasi yang telah terjebak pada persoalan personalisasi politik. Individu elite partai menjadi image partai sekaligus orang yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan partai dalam jangka waktu yang lama. Padahal, partai politik telah memiliki mekanisme suksesi, namun satu sosok elite tetap mampu mempersonalikan partainya. Penelitian ini melihat ada beberapa aspek yang menjadi

penyebabnya, termasuk sejarah pendirian partai, kepemimpinan karismatik dan pendanaan partai. Di luar itu, presidensialisme, sistem kepartaian dan sistem pemilu menjadi faktor yang turut memfasilitasi munculnya personalisasi partai. Personalisasi partai ini harus dihindari karena dalam jangka panjang akan berdampak negatif tidak hanya kepada partai politik, tetapi juga pada upaya penegakan demokrasi di Indonesia.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Danny Hayes & Jennifer L. Lawless, “Mitos Dan Realita Perempuan Dalam Pemilu: Pelajaran Dari Situasi Politik Amerika Di Era Polarisasi Politik”. *Review* yang ditulis Mouliza K.D Sweinstani menelaah respon dari situasi politik Amerika yang berkaitan dengan eksistensi perempuan dalam kehidupan politik Amerika Serikat khususnya dalam dua pemilu selama pada tahun 2010 dan 2014. Buku ini juga memberikan cara pandang baru terhadap area politik di era terpolarisasi di Amerika Serikat dengan berusaha membongkar pemahaman konvensional mengenai bias yang harus dihadapi oleh perempuan dalam dunia politik. Selain itu buku ini juga berusaha mencari tahu apa sebetulnya yang menjadi penyebab masih adanya pemahaman bias gender dalam area politik di Amerika Serikat. Hanya saja, simpulan dari buku ini perlu digunakan secara hati-hati agar pembaca tidak melakukan generalisasi atas kondisi politik yang telah dianggap netral gender dan tidak diskriminatif seperti yang terjadi di Amerika. Pembaca

sebaiknya mengontekskan kondisi lanskap politik masing-masing agar dapat menghasilkan temuan yang mengelaborasi temuan Hayes dan Lawless. Dengan demikian, hal ini dapat memperkaya studi-studi tentang kampanye politik, media dan kandidat perempuan dalam kajian ilmu politik.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai isu politik di tahun elektoral. Selamat membaca.

Redaksi

# KEMUNCULAN DAN TANTANGAN PARTAI POLITIK BARU PADA PEMILU 2019

## ***THE EMERGENCE AND CHALLENGES OF NEW POLITICAL PARTIES IN 2019 ELECTION***

**Ridho Imawan Hanafi**

Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Email: ridhoimawan@gmail.com

Diterima: 13 September 2018; Direvisi: 2 Oktober 2018; Disetujui: 30 Desember 2018

### ***Abstract***

*This paper discusses the emergence and challenges of new political parties in the 2019 Election by examining ideologies, programs, support bases, and leadership. The emergence of new political parties as an alternative political choice that is different from the old party. They have the opportunity to gain sympathy from voters who want to party change. These new nationalist parties have yet to portray a strong support base. Between one party and another, the support base is still liquid and can compete with each other for the voter market. Some new parties carry millennials generation a segment of their constituents. There are no strong figures who are popular and have a grassroots base, so they have to depend on the program in their campaign.*

**Keywords:** new political parties, concurrent election, ideologies, programs, support base, leadership.

### **Abstrak**

Artikel ini membahas mengenai kemunculan dan tantangan partai politik baru pada Pemilu 2019 dengan menelaah ideologi-program, basis dukungan, dan kepemimpinan. Partai baru muncul sebagai alternatif pilihan politik yang berbeda dari partai lama yang sudah ada. Partai politik baru ini bisa mendapatkan simpati dari pemilih yang menginginkan kebaruan dalam kepartaian. Partai-partai baru membawa corak nasionalis dengan kecenderungan program yang tidak jauh berbeda dari partai baru lain. Antara satu partai dan lainnya basis dukungan masih cair dan bisa saling memperebutkan pasar pemilih. Sebagian partai baru mengusung kekuatan milenial sebagai segmentasi pemilihnya. Tantangan partai baru salah satunya adalah kepemimpinan, yakni tidak adanya figur kuat yang populer dan memiliki basis di akar rumput, sehingga harus mengandalkan kekuatan seperti program partai.

**Kata Kunci:** partai politik baru, pemilu serentak, ideologi, program, basis dukungan, kepemimpinan partai.

### **Pendahuluan**

Pemilu 2019 menjadi momentum politik baru bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Pada ajang demokrasi lima tahunan tersebut, gelaran Pemilu 2019 berbeda skema dari pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk pertama kalinya pemilu digelar secara serentak (*concurrent election*), yakni pemilihan legislatif dan pemilihan presiden akan dilaksanakan pada waktu bersamaan pada

17 April 2019. Pemilu-pemilu sebelumnya di era reformasi dilaksanakan dengan format waktu yang berbeda, yakni pemilihan legislatif mendahului pelaksanaan pemilihan presiden.

Untuk Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan partai politik peserta pemilu yang berjumlah 20 partai, yakni 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal di Aceh. Dari jumlah partai politik peserta

tersebut terdapat empat wajah pendatang baru untuk Pemilu 2019, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).

Kemunculan partai baru dalam Pemilu 2019 bukan merupakan fenomena pertama kali sejak era reformasi. Setelah keruntuhan rezim otoriter pada 1998 salah satu upaya menyambut perubahan rezim ke arah demokratis adalah dengan pendirian partai politik. Sejak itu sejumlah partai dibentuk dan bersaing memperebutkan suara di pemilu. Pendirian partai-partai di awal reformasi disebut karena *political euphoria*, lebih sebagai sebuah luapan emosi politik yang tersumbat selama rezim Orde Baru berkuasa.<sup>1</sup>

Tidak kurang pada masa itu tumbuh 181 partai yang kemudian hanya 141 partai yang bisa diterima oleh Departemen Kehakiman ketika itu, karena dinilai memenuhi persyaratan hukum. Dari jumlah itu, hanya 48 partai yang kemudian ditetapkan menjadi peserta Pemilu 1999.<sup>2</sup> Jumlah peserta pemilu yang banyak tersebut tentu berbeda situasinya ketika membandingkan pemilu era sebelumnya yang hanya diikuti oleh tiga kontestan pemilu. Dalam perkembangannya, pemilu-pemilu era reformasi umumnya diwarnai kehadiran partai baru, baik itu yang sama sekali baru atau lahir karena berasal dari konflik atau perpecahan di partai.<sup>3</sup>

Masuknya partai baru dalam kompetisi pemilu membuat ruang persaingan menjadi ketat karena mereka akan saling berebut pasar pemilih. Partai baru pada pemilu akan berhadapan dengan partai lama yang cenderung sudah bisa mempertahankan eksistensinya di pemilu dengan dibuktikan melalui keberhasilan mereka meraih kursi di parlemen. Tulisan ini menganalisis kemunculan partai baru dan tantangannya dengan melihat program partai, basis dukungan,

<sup>1</sup> Daniel Dhakidae, "Partai-Partai Politik di Indonesia: Kisah Pergerakan dan Organisasi dalam Patahan-Patahan Sejarah," dalam Tim Penelitian dan Pengembangan (Tim Litbang) Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi, Strategi, dan Program*, (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 29.

<sup>2</sup> Daniel Dhakidae, "Partai-Partai Politik...,

<sup>3</sup> Daniel Dhakidae dkk, *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), hlm. 6-11.

dan kepemimpinan partai dalam menghadapi persaingan pemilu dan bagaimana partai-partai baru membedakan diri dengan partai lama. Dengan melihat pada beberapa aspek tersebut dimungkinkan bisa mendapatkan seperti apa gambaran kebaruan partai dalam kompetisi elektoral.

Kemunculan partai-partai berbanding lurus dengan tumbuhnya proses demokratisasi khususnya berkaitan dengan kesamaan hak warga negara.<sup>4</sup> Demokrasi mensyaratkan adanya partai politik. Karena itu, kata Schattschneider, demokrasi modern tidak bisa dibayangkan tanpa partai politik.<sup>5</sup> Partai politik memainkan peran penting dalam sistem pemerintahan demokrasi dalam mendorong warga berpartisipasi aktif dalam politik dan juga dalam sebuah pemilihan untuk jabatan publik.<sup>6</sup> Tumbuhnya partai politik sendiri juga tidak bisa dilepaskan oleh akar sosial politik masyarakat. Lipset dan Rokkan, misalnya, mengelaborasi hubungan antara pembelahan sosial dan partai politik yang didasarkan studi komparatif atas negara-negara Eropa Barat. Proses pembangunan nasional awal dan revolusi industri memecah belah masyarakat dan bahwa pembelahan sosial yang dihasilkan mengalami politisasi dalam bentuk partai politik dengan munculnya demokrasi modern.<sup>7</sup>

Di Indonesia, kelahiran partai-partai politik jika ditarik ke belakang juga terkait dengan kebijakan politik etik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang salah satu implikasinya melahirkan kebebasan yang lebih luas di masyarakat yang kemudian mendorong warga membentuk partai dan pemerintah Belanda juga membentuk parlemen (*volksraad*). Kelahiran partai tersebut juga didorong untuk memperjuangkan kemerdekaan.<sup>8</sup> Di samping

<sup>4</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 59.

<sup>5</sup> John Kenneth White, "What is Political Party", dalam Richard S Katz. dan William Crotty (Eds.), *Handbook of Party Politics*, (London: Sage Publications, 2006), hlm. 7.

<sup>6</sup> John Kenneth White, "What is Political Party.., hlm. 8.

<sup>7</sup> Peter M. Siavelis, "Party and Social Structure", dalam Richard S Katz. dan William Crotty (Eds.), *Handbook of Party Politics*, (London: Sage Publications, 2006), hlm. 360.

<sup>8</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia..,hlm. 8.*

iklim kebebasan itu, munculnya partai di Indonesia juga tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Indonesia yang plural dan kemudian melahirkan sistem multipartai. Era sebelum dan sesudah kemerdekaan pertumbuhan partai juga berkaitan dengan ikatan kelompok yang kuat, terlebih ikatan ideologi yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan politik aliran. Perkembangan ini kemudian termatikan ketika pemerintah Orde Baru melakukan upaya penyeragaman ideologi yang mengharuskan partai politik untuk berasaskan tunggal, atas Pancasila. Yang kemudian di era reformasi penyeragaman itu dihapuskan.<sup>9</sup>

Harmel (1985) melihat bahwa kemunculan partai baru di antaranya dibentuk untuk menjawab tantangan isu-isu baru. Partai baru ini terkait dengan pembelahan dalam sistem kepartaian. Kemunculan partai baru bagi Harmel juga terkait dengan peristiwa sejarah tertentu di masyarakat.<sup>10</sup> Mair dan Erlingsson dalam Bolin (2007) melihat interpretasi yang serupa bahwa partai baru merupakan partai yang awalnya bukan sebagai anggota sistem partai yang pernah terkonsolidasi. Secara umum partai-partai baru ini muncul dalam tiga cara yang berbeda. Pertama, partai baru muncul sebagai konsekuensi penggabungan dua atau lebih partai yang didirikan. Kedua, partai-partai baru terbentuk sebagai akibat dari perpecahan internal. Ketiga, partai baru muncul sebagai partai yang benar-benar baru, tidak terkait dengan partai lain.<sup>11</sup>

Sementara Harmel dan Robertson (1985) mengidentifikasi tiga faktor kemunculan partai baru. Faktor sosial, melihat bahwa partai muncul karena representasi masyarakat atau pembelahan. Faktor politik, melihat jumlah partai dan dimensi pembelahan dalam sistem kepartaian, isu ideologi. Dan, faktor struktural, yang terkait dengan sistem pemilu. Keduanya melihat sistem pemilu proporsional lebih membuka peluang

<sup>9</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia..* hlm. 60.

<sup>10</sup> Robert Harmel, "On the Study of New Parties," *International Political Science Review*, Vol 6, No. 4. (October 1985), 403-418.

<sup>11</sup> Niklas Bolin, "New Party Entrance – Analyzing the Impact of Political Institutions", *Umeå Working Papers in Political Science*, Department of Political Science, Umeå University, Umeå, Sweden, No. 2 (2007).

bagi kemunculan partai baru daripada sistem mayoritas atau pluralitas.<sup>12</sup>

Selain aspek-aspek tersebut, perhitungan *strategic entry* sebagaimana dikemukakan oleh Cox (1997) yang kemudian dirujuk Tavits (2006) menjelaskan bagaimana kemunculan partai baru. Teori ini mengungkapkan munculnya partai baru lebih karena hasil dari keputusan elite politik untuk memasuki arena pemilihan sebagai konstestan baru. Keputusan ini didasarkan biaya memasuki arena, keuntungan duduk di panggung kekuasaan, dan adanya kemungkinan untuk memperoleh dukungan pemilih.<sup>13</sup>

Tavits (2006) sendiri dengan melanjutkan pandangan Cox melalui risetnya di 22 negara yang relatif maju demokrasinya menjelaskan bahwa kemunculan partai-partai baru terkait dengan biaya pendaftaran partai (*cost of registering a party*), ketersediaan dana publik (*public funding*), permisifnya institusi pemilihan seperti biaya untuk masuk dalam pemilihan, level korporatisme (keuntungan yang didapat dari kekuasaan), durasi demokrasi (*duration of democracy*), dan jumlah tanda tangan yang diperlukan untuk petisi dukungan pembentukan partai semacam dukungan dari pemilih (*the probability of electoral support*).<sup>14</sup>

Dasar dari analisis model tersebut adalah bahwa pembentukan partai baru merupakan hasil perhitungan oleh aktor rasional yang menyeimbangkan biaya formasi di satu sisi dan di sisi lain manfaat duduk di kekuasaan serta probabilitas keterpilihannya. Untuk itu, mengikuti analisis tersebut program partai merupakan salah satu insentif munculnya partai baru. Dengan kata lain, keragaman program oleh partai politik merupakan salah satu hal yang penting dalam proses pembentukan partai baru.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Robert Harmel and John D. Robertson, "Formation and Success of New Parties: A Cross-National Analysis", *International Political Science Review*, Vol 6, No. 4 (1985): 501-523.

<sup>13</sup> Margit Tavits, "Party System Change: Testing a Model of New Party Entry", *Party Politics*, Vol.12, No. 1 (2006): 99-119.

<sup>14</sup> Margit Tavits, "Party System Change..,

<sup>15</sup> Ignacio Lago and Ferran Martínez, "Why New Parties?", *Party Politics*, Vol. 17, No. 1 (2011): 3 -20.

Poguntke memberikan beberapa gambaran tentang fitur-fitur partai baru di antaranya, ideologi politik yang baru; organisasi partai yang partisipatoris, ini terkait dengan dengan tingkat formalisasi dan birokratisasi yang rendah; gaya politik yang tidak konvensional, partai bertindak sebagai bagian integral gerakan sosial baru; dan fitur keanggotaan dan profil pemilihnya, ini terkait keanggotaan dan profil seperti muda, berpendidikan tinggi, bekerja dalam sektor jasa.<sup>16</sup>

Untuk membedakan kebaruan partai dengan partai lama, Barnea dan Rahat memberi kerangka perspektif. Pertama, dari aspek partai di kontes elektoral. Aspek ini meliputi label partai (*party label*), seperti apakah nama partai benar-benar baru; ideologi (*ideology*), yakni seberapa berbeda *platform* atau program partai baru dengan partai lama; dan pemilih (*voters*), yakni seberapa berbeda basis dukungan atau basis sosial pemilih berbeda dengan partai lama. Kedua, aspek partai sebagai organisasi, meliputi status legal-formal partai, institusi, dan aktivitas partai. Aktivitas partai merujuk pada apakah partai baru memiliki aktivis partai yang baru atau aktivis pindahan dari partai lama. Ketiga, aspek partai di pemerintahan. Aspek ini meliputi dua kriteria yakni, perwakilan, terkait tentang siapa kandidat perwakilan atau kandidat legislatifnya, apakah orang baru atau sebagian berasal dari partai lama; dan kriteria kebijakannya, terkait seberapa berbeda kebijakan partai baru dan partai lama.<sup>17</sup>

Kemunculan partai baru ini setidaknya bisa dilihat dari perspektif kelembagaan dan perspektif sosiologis. Dua perspektif ini berkontribusi pada pemahaman tentang apa yang menyebabkan partai-partai baru muncul dan masuk ke arena parlemen. Beberapa pandangan juga menggunakan konsep struktur peluang politik untuk melihat sulit atau mudahnya orang memasuki sistem politik. Konsep ini berasal dari gerakan sosial dan merupakan cara mengeskpresikan tingkat keterbukaan dan aksesibilitas dari sistem politik. Kemungkinan

yang menguntungkan untuk partai baru muncul ketika hambatan kelembagaan rendah, atau ketika ada pandangan yang tersebar luas bahwa partai-partai yang didirikan tidak lagi mewakili para pemilih. Oleh karena itu, struktur peluang politik yang tidak ketat dapat diasumsikan sebagai kondisi yang diperlukan bagi partai-partai baru untuk dipilih menjadi anggota parlemen nasional.<sup>18</sup>

Sementara untuk tantangan keberhasilan partai baru bisa bersaing dalam kompetisi di pemilu setidaknya dapat dikaitkan dengan pertama, bagaimana proyek politiknya, yakni upaya partai dalam menangani masalah-masalah yang mendesak sebagian besar pemilih. Kedua, sumber daya partainya, seperti halnya anggota partai, modal, manajemen, dan publikasi media massa. Ketiga, bagaimana struktur peluang politik. Ini terkait dengan kondisi kelembagaan, kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Faktor-faktor ini mempengaruhi secara berbeda dan tergantung jenis partai baru.<sup>19</sup>

Selain itu, Bolin melihat bahwa sistem pemilu (*electoral system*) juga menjadi faktor signifikan untuk menjelaskan bisa tidaknya partai-partai baru masuk ke parlemen nasional.<sup>20</sup> Hino (2006) dalam Lago dan Martinez (2011) menjelaskan kemunculan partai baru yang sukses dimungkinkan ketika terbuka struktur peluang politik yang dikondisikan melalui aspek institusional dan politik. Dalam risetnya, Hino menemukan bahwa sistem pemilu merupakan salah satu kunci keberhasilan partai baru.<sup>21</sup>

Selain sistem pemilu, Sikk (2011) menekankan pentingnya kebaruan dalam hal ini apakah partai benar-benar berbeda, dalam hal ini ideologi maupun program-programnya dengan partai-partai lama menjadi salah satu formula

<sup>16</sup> Thomas Poguntke, "New Politics and Party Systems: The Emergence of a New Type of Party?", *West European Politics*, 10, 1 (1987): 76-88.

<sup>17</sup> Shlomit Barnea and Gideon Rahat, "Out With the Old, in With the New": What Constitutes a New Party?", *Party Politics*, 17, 3 (2010): 303-320.

<sup>18</sup> Niklas Bolin, "New Party Parliamentary Entry in Western Europe 1960-2010", *European Journal of Government and Economics*, Volume 3, Number 1 (June 2014).

<sup>19</sup> Paul Lucardie, Prophets, "Purifiers and Prolocutors: Towards a Theory on the Emergence of New Parties", *Party Politics*, Vol. 6. No.2 (2000):175-185.

<sup>20</sup> Niklas Bolin, "New Party Parliamentary Entry...,

<sup>21</sup> Ignacio Lago and Ferran Martínez, "Why New Parties?...,

keberhasilan partai baru.<sup>22</sup> Zuborova (2015) menilai bahwa salah satu alasan kemunculan dan keberhasilan partai politik baru bergantung pada kemampuan untuk mempromosikan ide-ide, yang meskipun lama, namun dengan cara baru atau model baru.<sup>23</sup> Ia juga melihat bahwa aspek pemimpin partai juga memiliki pengaruh dalam menentukan keberhasilan partai baru.<sup>24</sup>

Kepemimpinan dalam tahap-tahap awal pertumbuhan partai menjadi salah satu aspek yang menentukan keberhasilan dan kelangsungan partai. Kemampuan kepemimpinan yang dimaksud dalam tahap awal ini, sebagaimana Harmel dan Svasand (1993) jelaskan, adalah kepemimpinan dengan sosok yang berkarisma atau populer, yang mungkin bisa menarik pendengar atau khalayak ramai dan mengasosiasikannya tidak hanya dengan pemimpin, tetapi dengan partai.<sup>25</sup> Kehadiran pemimpin partai dengan kelebihan seperti itu memiliki keuntungan ketika kesetiaan pemilih masih cair. Banyak pemilih yang cenderung menghubungkan ke partai baru hanya atau sebagian melalui kepribadian tertentu dari pemimpin partai. Pemimpin partai barangkali dianggap lebih penting untuk pengakuan publik daripada misalnya, program partai karena sebagian pemilih tidak memiliki pengetahuan atau informasi politik yang sama.<sup>26</sup>

Di Indonesia kemunculan partai-partai baru selain juga dilatari dengan pluralistik dan majemuk masyarakatnya, menurut Marijan, juga karena didorong pertama, demokrasi merupakan kondisi yang masih berproses. Sistem pemilu, sistem kepartaian di Indonesia masih belum sepenuhnya baku dan masih mencari bentuk ideal. Kedua, belum adanya aturan yang ketat dalam pemilu (*electoral rules*), mengenai masuknya

<sup>22</sup> Allan Sikk, "Newness as a Winning Formula for New Political Parties", *Party Politics*, 18, 4 (2011): 465–486.

<sup>23</sup> Viera Zúborová, "Newcomers in Politics? the Success of New Political Parties in the Slovak and Czech Republic after 2010?", *Baltic Journal of Law and Politics*, 8, 2 (2015): 91-111.

<sup>24</sup> Viera Zúborová, "Newcomers in Politics...,

<sup>25</sup> Robert Harmel and Lars Svasand, "Party Leadership and Party Institutionalisation: Three Phases of Development", *West European Politics*, 16, 2 (2007): 67-88.

<sup>26</sup> Nicole Bolleyer and Evelyn Bytzek, "New Party Performance after Breakthrough: Party Origin, Building and Leadership", *Party Politics*, (2006): 1-11.

partai baru dalam pemilu, seperti aturan bagi partai-partai yang tidak lolos *threshold* atau ambang batas parlemen dan kemudian berubah wajah menjadi partai baru untuk bisa mengikuti pemilu berikutnya. Ketiga, suara pemilih belum terikat kuat dengan partai-partai yang sudah ada, sehingga masih memungkinkan pemilih untuk berpindah dan menemukan partai yang dianggap merepresentasi kepentingan pemilih.<sup>27</sup>

## Partai Baru dan Skema Pemilu

Pemilu 2019 menggunakan regulasi UU Nomor 7 Tahun 2017. Regulasi ini di dalamnya mengatur persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu, seperti halnya telah lulus verifikasi dan memenuhi persyaratan badan hukum, memiliki kepengurusan dari level pusat sampai daerah, memiliki keanggotaan, dan lain sebagainya.<sup>28</sup> Sebagai peserta pemilu yang baru juga akan berhadapan dengan skema pemilu yang baru, yakni pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tidak digelar dalam waktu yang berbeda.

Selain skema serentaknya, terdapat sejumlah perubahan pada Pemilu 2019. Perubahan salah satunya adalah ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4 persen, sementara Pemilu 2014 ambang batasnya 3,5 persen. Angka ambang batas ini tentunya menjadi salah satu tantangan yang harus dilalui partai baru untuk bisa menempatkan wakilnya di parlemen. Untuk alokasi kursi per dapil tidak berubah, masih seperti pemilu sebelumnya yakni 3-10 kursi. Metode konversi suara yang diputuskan adalah *sainte lague* murni. Metode ini baru diterapkan untuk Pemilu 2019. Pemilu-pemilu sebelumnya menggunakan metode kuota (kuota *hare*). Metode kuota ini biasanya lebih dikenal dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP).

Sedangkan untuk ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) bagi partai atau gabungan partai politik adalah 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.<sup>29</sup> Jumlah kursi DPR juga mengalami penambahan. Kursi DPR pada Pemilu 2019 berjumlah 575

<sup>27</sup> Kacung Marijan., 2010, hlm. 65.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 173 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

<sup>29</sup> UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

kursi. Bertambah 15 kursi dari Pemilu 2014.<sup>30</sup> Jumlah 15 kursi DPR ini diprioritaskan untuk daerah di luar Jawa dengan mempertimbangkan keseimbangan dan kesetaraan antar daerah.<sup>31</sup> Meskipun jumlah kursi untuk daerah pemilihan anggota DPR alokasinya 3-10 kursi, namun UU Pemilu yang baru menyebut untuk jumlah kursi DPRD provinsi paling sedikit 35 dan paling banyak 120 kursi. Sementara pada Pemilu 2014 jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus).<sup>32</sup>

Melihat aturan ambang batas parlemen sebesar 4 persen, menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik baru. Ambang batas merupakan dukungan suara minimal yang harus dimiliki partai untuk memperoleh kursi di parlemen. Merujuk dua pemilu sebelumnya misalnya, pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, ambang batas parlemen sudah diberlakukan dengan angka 3,5 persen. Pemilu 2009 diikuti 38 partai nasional dan enam partai lokal. Hasilnya hanya sembilan partai yang bisa memperoleh kursi di DPR. Dari sembilan ini ada tujuh partai sudah ada sebelumnya. Hanya dua partai baru yang masuk parlemen yakni Partai Gerindra dan Partai Hanura. Sebagian besar partai-partai baru lainnya tidak memperoleh suara yang bisa mengantar mereka ke parlemen.<sup>33</sup> Sementara pada Pemilu 2014, diikuti oleh 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal di Aceh. Hasilnya, 10 partai politik nasional yang dapat memperoleh kursi di DPR. Dari jumlah itu terdapat satu partai baru yang lolos parlemen, yakni Partai Nasdem.<sup>34</sup>

<sup>30</sup> Jumlah kursi DPR pada Pemilu 2019 sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berjumlah 575. Jumlah ini bertambah dibandingkan dengan Pemilu 2014 yang berjumlah 560, sebagaimana disebut dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>31</sup> Kompas.id, “Kursi DPR menjadi 575”, 31 Mei 2017, <https://kompas.id/baca/polhuk/politik/2017/05/31/kursi-dpr-menyebut-575/>, diakses pada 1 Oktober 2018.

<sup>32</sup> Perbandingan perubahan kursi DPRD bisa dilihat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 8 Tahun 2012.

<sup>33</sup> Kacung Marijan ..., 2010, hlm. 70-72.

<sup>34</sup> Bastian Nainggolan dan Yohan Wahyu, *Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016), hlm. 259.

## Ideologi – Program Partai Baru

Sebagai pendatang baru, penggambaran wajah partai terkait dengan pemeriksaan akan kemunculan atau latar belakang mengapa partai dibentuk, hal ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana kiprah mereka dalam persaingan merebut suara pemilih. Penggambaran ini terkait dengan bagaimana organisasi partai, apakah partai baru memiliki kaitan dengan kelompok-kelompok masyarakat, siapa yang berperan aktif dalam pendirian partai, infrastruktur penopang serta sumber daya partai, program atau orientasi partai.<sup>35</sup> Yang terkait itu juga adalah bagaimana wajah ideologi partai.

Ideologi menjadi penting bagi partai karena dipandang sebagai sebuah sistem keyakinan yang menjadi identitas partai. Ideologi politik merupakan hal fundamental partai dan menjadi alat yang dapat digunakan partai tidak hanya untuk menarik suara, namun juga untuk memotivasi aktivis dan menjadi jembatan dengan organisasi non partai. Ideologi bisa menjadi semacam peta konseptual bagi para pemimpin partai, aktivis, dan para pemilih untuk menafsirkan kampanye dan isu-isu.<sup>36</sup>

Empat partai baru hadir dengan menawarkan ideologi yang cenderung tidak berbeda. Baik Partai Perindo, PSI, Partai Garuda, dan Partai Berkarya menyatakan diri sebagai partai yang berasas Pancasila.<sup>37</sup> Keempat partai berada dalam kelompok partai-partai nasionalis. Kecenderungan partai-partai di Indonesia meminjam Kevins Evans, dapat dibedakan dalam dua sumbu yang diametral, yakni ideologi Islam dan nasionalis. Meskipun demikian pada garis tengah menunjukkan terjadinya percampuran ideologi pada kadar yang berbeda-beda.

Semakin dekat ke kanan, partai tersebut akan semakin kental dengan ideologi Islam, demikian pula semakin dekat ke kiri semakin kental dengan nasionalis. Sementara jika semakin bergeser ke

<sup>35</sup> Nicole Bolleyer, *New Parties in Old Party Systems Persistence and Decline in Seventeen Democracies*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 1-4

<sup>36</sup> Francesca Vassallo and Clyde Wilcox, “Party as a Carrier of Ideas” dalam Richard S Katz. dan William Crotty (Eds.), *Handbook of Party Politics*, (London: Sage Publications, 2006), hlm. 413-414.

<sup>37</sup> Lihat: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo, PSI, Partai Garuda, dan Partai Berkarya.

tengah apakah dari sisi kiri dan kanan, tingkat kekentalan ideologinya relatif “berkurang,” dalam arti ada kemungkinan percampuran dengan ideologi lain. Menurut Evans, ideologi pada partai-partai di Indonesia sifatnya dinamis dan tidak statis, karena ada gerak pendulum antara ideologi kiri-kanan tergantung pada konteks sosial-politik, dinamika politik dan kepentingan politik.<sup>38</sup>

Corak nasionalis tersebut tampak dari latar pendirian partai-partai baru. Partai Perindo dideklarasikan di Jakarta 7 Februari 2015. Didirikan oleh pengusaha nasional dari MNC Group Harry Tanoeesoedibjo. Pada awalnya partai ini adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang didirikan pada 24 Februari 2013. Melacak jejak Harry, ia mengawali karir politiknya dengan bergabung bersama Partai Nasdem pada tahun 2011. Namun ia kemudian memutuskan mundur pada 21 Januari 2013. Keputusannya mundur dari Nasdem ini karena ada perbedaan pendapat dengan pimpinan Nasdem Surya Paloh yang ketika itu akan maju sebagai ketua umum.

Harry kemudian bergabung dengan Partai Hanura menjelang Pemilu 2014 dan bahkan bersama Wiranto, ketua umum Hanura, sempat mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres dan cawapres Hanura. Hanya saja perolehan suara di pileg tidak cukup untuk maju pilpres. Keduanya kemudian berpisah jalan dalam mendukung pasangan capres. Wiranto mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dan Harry mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.<sup>39</sup>

Dalam visinya, Perindo ingin mewujudkan Indonesia yang berkemajuan, bersatu, adil, makmur, sejahtera, berdaulat, bermartabat dan berbudaya.<sup>40</sup> *Platform* perjuangan partai tertera dalam Garis Besar Perjuangan Partai (GBPP), yang memuat tata nilai dan konsepsi perjuangan. *Platform* partai ini terlihat fokus pada aspek

<sup>38</sup> Lihat: Kevin Evans dalam Moch.Nurhasim, “Masa Depan Partai Islam Era Reformasi: Sebuah Perspektif Analisis dalam Moch. Nurhasim (ed), *Masa Depan Partai Islam di Indonesia: Studi tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor-Faktor Penyebabnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 18-20.

<sup>39</sup> Kompas.com, “Partai Perindo dan Penantiannya di Pemilu 2019”, 22 Februari 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/08292081/partai-perindo-dan-penantiannya-di-pemilu-2019>, diakses pada 23 September 2018.

<sup>40</sup> Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo.

perbaikan kondisi ekonomi bangsa, seperti peningkatan *income* per kapita, mengurangi kesenjangan sosial, memperluas lapangan kerja, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta jaminan sosial.<sup>41</sup>

Garis perjuangan tersebut juga diungkapkan dalam misi partai yang diantaranya menekankan pada aspek-aspek penegakan hukum, keadilan, dan mendorong perekonomian nasional.<sup>42</sup> Aspek-aspek tersebut tampaknya menjadi fokus perjuangan partai pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi seperti pembukaan lapangan kerja yang tampaknya juga kerap dilontarkan dalam penyampaian-penyampaian elite partai di depan publik.<sup>43</sup>

Berangkat dari keinginan untuk berbeda dari partai-partai lama, PSI didirikan. Melalui inisiasi sejumlah figur muda, salah satunya Grace Natalie, yang kemudian menjadi ketua umum partai. Partai ini didirikan pada 16 November 2014. Dalam penyampaiannya, PSI mencoba membawa perubahan kondisi politik, khususnya bagi anak-anak muda yang sudah tidak percaya pada partai lama.<sup>44</sup> Anak muda dan perempuan dianggap PSI selama ini kurang terwakili kepentingannya di dunia politik.<sup>45</sup> Partai yang berdasarkan Pancasila ini membawa visi Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat.<sup>46</sup>

Latar belakang PSI yang terekam dalam proses pendiriannya adalah ingin menawarkan

<sup>41</sup> Abdul Khaliq Ahmad, “Mengenal Platform Partai Perindo”, 6 Februari 2015, <https://nasional.sindonews.com/read/960819/18/mengenal-platform-partai-perindo-1423193546/>, diakses pada 29 September 2018.

<sup>42</sup> Abdul Khaliq Ahmad, “Mengenal Platform Partai Perindo”..,

<sup>43</sup> Idntimes.com, “Mengenal Perindo Partai Baru Peserta Pemilu”, 3 Maret 2018, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/mengenal-perindo-partai-baru-peserta-pemilu-1/full>, diakses pada 29 September 2018.

<sup>44</sup> Kompas.com, PSI, Grace Natalie dan Citra Partai Anak Muda”, 22 Februari 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/12132451/psi-grace-natalie-dan-citra-partai-anak-muda>, diakses pada 30 September 2018.

<sup>45</sup> Tempo.co.id, “Empat Partai Baru di Pemilu 2019”, 19 Februari 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1062006/empat-partai-baru-di-pemilu-2019-dan-kekuatan-pendirinya/full&view=ok>, diakses pada 30 September 2018.

<sup>46</sup> Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PSI.

kebaruan dari partai-partai yang sudah ada. PSI melihat bahwa era reformasi membuat sejumlah institusi negara telah melakukan reformasi ke dalam dan keluar lembaganya, namun tidak dengan partai yang dianggap PSI belum banyak melakukan perubahan, mulai dari pengkaderan sampai produk partai yang dihasilkan.<sup>47</sup>

*Platform* kebijakan publik yang digariskan PSI berangkat dari tantangan yang dihadapi Indonesia yang kompleks mulai dari aspek dasar pelembagaan institusi sosial, politik, ekonomi, sampai pada layanan publik dasar, seperti penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan juga tantangan kompetisi global. Dengan tantangan itu, PSI melihat perlunya melakukan transformasi yakni perubahan dan penyesuaian kerangka institusional pada lingkup negara. Dengan berpegang pada nilai-nilai partai seperti kebijakan, keragaman, keterbukaan dan meritokrasi, PSI ingin menjadi pelaku aktif transformasi itu. PSI merumuskan *platform* transformasi sesuai dengan cakupan dan kompleksitas agenda-agenda kebijakan publik nasional, mulai dari bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, internasional, sampai kesejahteraan rakyat.<sup>48</sup>

Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau yang akrab disebut dengan Partai Garuda berdiri 16 April 2015.<sup>49</sup> Sebelum partai ini ditetapkan sebagai salah satu peserta pemilu, publik belum banyak mengenalnya.<sup>50</sup> Partai ini dipimpin oleh Ahmad Ridha Sabana. Kemunculan partai ini sebagai peserta pemilu juga diiringi oleh isu yang mengaitkan dengan keluarga mantan

<sup>47</sup> PSI.id, "Pembentukan Partai PSI Berawal dari Obrolan di Kafe", 26 Februari 2018, <https://psi.id/berita/2018/02/26/pembentukan-partai-psi-berawal-dari-obrolan-di-kafe/>, diakses pada 30 September 2018.

<sup>48</sup> [Https://psi.id/berita/content/cita-cita-psi/](https://psi.id/berita/content/cita-cita-psi/), diakses pada 30 September 2018.

<sup>49</sup> Kompas.com, Garuda Partai Baru yang Memulai Jejak Perdananya di Pemilu 2019", 21 Februari 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/21/16125861/garuda-partai-baru-yang-memulai-jejak-perdananya-di-pemilu-2019>, diakses pada 1 Oktober 2018.

<sup>50</sup> Kumparan.com,"Partai Garuda Bergerak dalam Senyap", 19 Februarai 2019, <https://kumparan.com/@kumparannews/partai-garuda-bergerak-dalam-senyap-untuk-bersaing-di-2019>, diakses pada 1 Oktober 2018.

presiden Soeharto atau yang dikenal dengan sebutan keluarga Cendana. Meskipun isu tersebut dibantah tegas oleh Sabana bahwa tidak ada kaitan antara partai dan keluarga Cendana.<sup>51</sup>

Partai Garuda juga dikaitkan jejaknya dengan Partai Kerakyatan Nasional (PKN) yang didirikan Harmoko pada 2007, tetapi gagal lolos verifikasi KPU untuk Pemilu 2009. Kemudian pada 2015 PKN menggelar kongres dan salah satu putusannya mengubah nama partai menjadi Partai Garuda.<sup>52</sup> Namun, Sekjen Partai Garuda Abdullah Mansuri menyatakan nyaris tak ada pengurus PKN yang terlibat dalam Partai Garuda. Partai Garuda saat ini murni menggunakan jaringan baru dan orang baru.<sup>53</sup>

Partai Garuda dalam cikal bakal berdirinya berlatar karena munculnya keresahan masyarakat, termasuk dirinya dalam hal penyampaian aspirasi.<sup>54</sup> Partai Garuda memiliki asas Pancasila dengan ciri partai menegakkan sendi pemahaman nasionalis, religius, kerakyatan. Visi Partai Garuda adalah terwujudnya cita-cita perubahan Indonesia.<sup>55</sup> Salah satu misinya terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam hal relasinya dengan organisasi masyarakat Partai Garuda menggunakan jaringan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) sebagai jaringan utama bergerak. Sehingga salah satu sumber dari basis partai adalah mereka yang tergabung dalam Ikappi.<sup>56</sup> Partai Garuda juga menggunakan jaringan pengusaha para pengurusnya untuk menyerap dana. Misalnya, dari Koperasi Pedagang Pasar Indonesia milik

<sup>51</sup> Kumparan.com,"Partai Garuda Bergerak dalam Senyap"...,

<sup>52</sup> Tirto.id, "Metamorfosis Partai Garuda Dari Harmoko ke Big Data", 20 Juni 2018, <https://tirto.id/metamorfosis-partai-garuda-dari-harmoko-ke-big-data-cMzw>, diakses pada 1 Oktober 2018.

<sup>53</sup> Tirto.id, "Metamorfosis Partai Garuda...",

<sup>54</sup> Idntimes.com, "Mengenal Partai Garuda Partai yang Digerakkan Millenials", 6 Maret 2018, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/vanny-rahman/mengenal-partai-garuda-partai-yang-digerakkan-millennials-1/full>, diakses pada 1 Oktober 2018.

<sup>55</sup> Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Garuda.

<sup>56</sup> Tirto.id, "Metamorfosis Partai Garuda...",

Ikappi.<sup>57</sup> Selain itu juga jejaring pengusaha melalui ketua umum partai yang juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha atau pedagang. Jejaring dana dari pengusaha ini salah satunya agar tidak membebani pengurus di daerah saat kunjungan partai.<sup>58</sup>

Didirikan pada 15 Juli 2016, Partai Berkarya adalah fusi dari dua partai politik yakni Partai Beringin Karya (BK) dan Partai Nasional Republik (Nasrep).<sup>59</sup> Partai Berkarya berasaskan Pancasila dengan ciri religius, kebangsaan, kerakyatan dan bersifat terbuka bagi seluruh warga negara Republik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial, dan gender. Visi dari Partai Berkarya adalah terwujudnya kehidupan bangsa Indonesia yang bertaqwa, aman, sejahtera, adil, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>60</sup> Partai Berkarya didirikan oleh Hutomo Mandala Putra atau dikenal dengan Tommy Soeharto yang juga anak dari mantan presiden Soeharto. Partai ini menggunakan logo pohon Beringin dan warna kuning yang juga menjadi ciri khas Partai Golkar. Menurut Tommy, Golkar yang asli seperti era Soeharto telah lahir kembali di Partai Berkarya.<sup>61</sup> Selain Tommy para anggota keluarga Cendana atau anak-anak Soeharto juga bergabung di partai ini yakni Sigit Harjojudanto, Siti Hardiyanti Indra Rukmana atau dikenal dengan Tutut, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Harijadi (Titiek), dan Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek).<sup>62</sup>

---

<sup>57</sup> Tirto.id, “Saat Jaringan Pedagang Ingin Punya Partai Lahirlah Partai Garuda,” 20 Juni 2018, <https://tirto.id/saat-jaringan-pedagang-ingin-punya-partai-lahirlah-partai-garuda-cMzx>, diakses pada 1 Oktober 2018.

<sup>58</sup> Tirto.id, “Saat Jaringan Pedagang..,

<sup>59</sup> [Https://www.berkarya.id/kepartaian.php#main](https://www.berkarya.id/kepartaian.php#main), diakses pada 1 Oktober 2018.

<sup>60</sup> Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya.

<sup>61</sup> Liputan6.com, “Partai Berkarya Parpol Baru Rasa Era Soeharto”, 26 Agustus 2018, <https://www.liputan6.com/pileg/read/3628248/partai-berkarya-parpol-baru-rasa-era-soeharto>, diakses 1 Oktober 2018.

<sup>62</sup> Detik.com, “Seluruh Keluarga Cendana Akhirnya Berlabuh di Partai Berkarya”, 21 Juli 2018, <https://news.detik.com/berita/4125828/seluruh-keluarga-cendana-akhirnya-berlabuh-di-partai-berkarya>, diakses pada 2 Oktober 2018.

Partai Berkarya menarik perhatian publik dengan membawa label “Orde Baru”. Partai ini membawa program partai yang popular di masa Orde Baru, yakni Trilogi Pembangunan dan Swasembada Pangan. Trilogi Pembangunan merupakan wacana pembangunan era Orde Baru yang terdiri atas stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi dan pemerataan pembangunan.<sup>63</sup> Kentalnya nuansa Orde Baru ini memang diakui oleh salah seorang pengurus teras partai, Priyo Budi Santoso. Menurutnya, partainya mengidolakan sosok kepemimpinan Soeharto. Menurutnya, ajaran Soeharto bisa menjadi jalan keluar dari berbagai persoalan bangsa yang tak kunjung selesai.<sup>64</sup> Menurut Badarudin Andi Picunang, salah seorang elite partai lain, bahwa Partai Berkarya bisa menjadi alternatif partai pilihan dari partai yang sudah ada terutama dari kelompok yang rindu terhadap Orde Baru.<sup>65</sup> Untuk itu Partai Berkarya menawarkan sejumlah program yang pernah dikerjakan Soeharto untuk diadopsi agar menarik dukungan pemilih.<sup>66</sup>

Persamaan yang terlihat pada partai-partai baru dengan partai-partai lama dan juga antara partai-partai baru itu sendiri adalah hal dasar dan ideologi. Keempat partai baru lebih mengarah pada corak nasionalis dan terbuka untuk menerima berbagai kalangan. Dengan itu partai-partai baru akan dihadapkan pada ceruk pemilih yang sama dengan ceruk partai-partai lama atau partai yang sudah mapan terutama yang bercorak nasionalis. Di satu sisi bisa menjadi tantangan, namun di sisi lain terbuka prospeknya untuk saling berebut suara. Hal ini juga terkait

---

<sup>63</sup> Idntimes.com, “Semua Hal Tentang Berkarya Partai Baru Bagi Yang Rindu Orde Baru”, 3 Maret 2018, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/linda/semuahal-tentang-berkarya-partai-baru-bagi-yang-rindu-orde-baru-1/full>, diakses 2 Oktober 2018.

<sup>64</sup> Kompas.com, “Berkarya Anggap Sistem Pemerintahan Soeharto dan Orde Baru Masih Relevan”, 15 Juli 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/15/15140461/berkarya-anggap-sistem-pemerintahan-soeharto-dan-orde-baru-masih-relevant>, diakses 2 Oktober 2018.

<sup>65</sup> Idntimes.com, *op. cit.*, 3 Maret 2018.

<sup>66</sup> Tempo.co, “Partai Berkarya Adopsi Program Soeharto Jaring Suara Pemilu 2019”, 16 Juni 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1098518/partai-berkarya-adopsi-program-soeharto-jaring-suara-pemilu-2019/full&view=ok>, diakses pada 2 Oktober 2018.

dengan lemahnya diferensiasi ideologi antar partai baru dan lama. Persoalan ideologi pada partai politik memang memudar atau mengalami erosi ketika Orde Baru melakukan upaya depolitisasi masyarakat, melakukan sentralisasi administrasi dan merampingkan sistem politik. Rezim berupaya untuk mempertegas menghapus politik aliran. Pada tahun 1973 dilakukan penyederhanaan sistem kepartaian.<sup>67</sup> Saat ini, terlihat adalah bahwa partai tidak lagi merupakan gerakan sosial yang memiliki jejaring organisasi sendiri yang erat.<sup>68</sup>

Dengan sketsa kebaruan wajah yang mencoba ditawarkan pada pemilih, partai baru mencoba berdiri sebagai antitesis terhadap partai yang ada. Kehadiran ini bisa menutup kelemahan partai lama dengan memunculkan harapan baru.<sup>69</sup> Salah satu kemungkinan yang terbuka adalah kelompok rasional yang lebih identik dengan kelas menengah kota, karena mereka yang bisa diduga lebih mempertimbangkan hal-hal seperti kebijakan publik yang ditawarkan. Namun, keefektifan perbedaan kebijakan sosial dan ekonomis tidak pernah terbukti mampu menjadi andalan merebut konstituen suatu partai.<sup>70</sup>

### Basis Dukungan Partai

Basis dukungan partai merupakan fitur partai dalam aspek kontes elektoral yang terkait dengan siapa pemilih partai (*voters*). Tantangan partai baru adalah bagaimana mereka menjaring segmen basis dukungan mereka dan berhadapan dengan segmen partai-partai lama. Kehadiran partai baru bisa didorong oleh ketidakpuasan terhadap mekanisme tradisional partai yang lama, birokratisasi mereka, ketidakpercayaan pada pemimpin, ini bisa mendorong sebagian warga yang aktif, muda, dan berpendidikan mencari lokus yang berbeda untuk mengekspresikan

<sup>67</sup> Andreas Ufen, “Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between *politik aliran* and ‘Philippinisation’”, *GIGA Working Papers*, No. 37, Desember 2006, GIGA German Institute of Global and Area Studies, hlm 1-35.

<sup>68</sup> Andreas Ufen, “Political Parties..,

<sup>69</sup> Alfan Alfian, Mengapa Parpol Baru?, *Harian Kompas*, 27 Agustus 2015.

<sup>70</sup> Daniel Dhakidae., 2004, hlm. 12.

partisipasi.<sup>71</sup> Maka partai baru dalam hal ini bisa membangun interaksi dengan basis-basis pemilih.

Melihat latar belakang berdirinya partai-partai baru Pemilu 2019, orientasi pemilihan basis dukungan bisa menjadi gambaran ke mana partai baru menjaring pemilih. Untuk mengidentifikasi basis sosial partai bisa melihat pada kepemimpinan partai untuk menarik dukungan melalui simbol, pernyataan publik, kampanye yang ditargetkan, dan juga program partai.<sup>72</sup>

PSI, misalnya, mereka menginginkan sasaran kalangan muda. Hal ini salah satunya juga ditunjukkan dengan para pengurus partai dari kalangan muda. Pengurus mereka rata-rata pada usia 20 sampai 30 tahun. Selain itu, usia tidak boleh lebih dari 45 tahun, dan syaratnya tidak boleh berasal dari mantan pengurus partai lain.<sup>73</sup> Segmen pemilih muda ini tidak bisa dilepaskan dari data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa hasil sensus 2010 diproyeksikan jumlah pemilih milenial tahun 2019 berkisar 55-58 persen. Milenial secara umum diartikan generasi yang mulai dewasa pada era millennium abad ke-21.

Mereka yang tergolong kelompok tersebut lahir sekitar awal 1980-an sampai awal 2000-an. Dalam Pemilu 2019, milenial adalah pemilih yang berusia 17- 38 tahun. Dengan proyeksi data BPS di atas, pemilih generasi ini akan berjumlah lebih dari 100 juta orang.<sup>74</sup> Pilihan untuk menyasar kalangan muda juga dibuktikan PSI dengan melakukan seleksi calon anggota legislatif dari kalangan muda (sebagian besar usia di bawah 45 tahun).<sup>75</sup> Dengan karakteristik

<sup>71</sup> Piero Ignazi, “The Crisis of Parties and the Rise of New Political Parties”, *Party Politics*, Vol. 2. No. 4 (1996): 549-566.

<sup>72</sup> Vicky Randall, “Political Parties and Social Structure in The Developing World”, dalam Richard S Katz. dan William Crotty (Eds.), *Handbook of Party Politics*, (London: Sage Publications, 2006), hlm. 391-392.

<sup>73</sup> Kumparan.com, “Mengenal PSI Partai Milenial Peserta Baru di Pemilu 2019”, 19 Februari 2018, <https://kumparan.com/@kumparannews/mengenal-psi-partai-milenial-peserta-baru-di-pemilu-2019>, diakses pada 2 Oktober 2018.

<sup>74</sup> Djayadi Hanan, Berebut Milenial, *Harian Kompas*, 28 Agustus 2018.

<sup>75</sup> Katadata.co, “Lebih Dari Separuh Caleg PSI Dari Kalangan

yang milenial seperti itu, dalam strateginya PSI salah satunya memanfaatkan media sosial sebagai alat diseminasi program partai, program caleg, menjawab isu-isu strategis.<sup>76</sup>

Sasaran spesifik pada generasi pemilih tampaknya tidak menjadi fokus pada partai-partai baru yang lain. Partai Perindo dan Berkarya misalnya, memilih segmen pemilih yang tidak jauh berbeda. Keduanya cenderung pada janji-janji ekonomi kerakyatan. Kemiripan program mereka seperti memberikan bantuan kepada petani, nelayan, hingga usaha kecil dan menengah.<sup>77</sup> Sejauh ini Perindo menjalankan program-program kerja seperti pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan membagikan gerobak Perindo. Gerobak ini ditujukan untuk mendorong perbaikan ekonomi warga.<sup>78</sup> Partai Berkarya terlihat lebih mengarah pada program-program ekonomi yang dinilai prorakyat dan ekonomi kreatif.<sup>79</sup> Ragamnya segmentasi pemilih yang ingin disasar ini juga terlihat dari calon anggota legislatif Perindo dan Partai Berkarya mereka yang terbuka bagi semua kalangan.<sup>80</sup>

---

Muda Profesional”, 17 Juli 2018, <https://katadata.co.id/berita/2018/07/17/lebih-dari-separuh-caleg-psi-dari-kalangan-muda-profesional>, diakses pada 2 Oktober 2018.

<sup>76</sup> Kumparan.com, “PSI Fokus Kampanye di Media Sosial Demi Dulang Suara di Pileg 2019”, 19 Februari 2018, <https://kumparan.com/@kumparannews/psi-fokus-kampanye-di-media-sosial-demi-dulang-suara-di-pileg-2019>, diakses pada 2 Oktober 2018.

<sup>77</sup> Lihat: <https://partaiperindo.com/?p=56358>, diakses pada 2 Oktober 2018 dan juga Republika.co.id, Partai Berkarya Fokus Kembangkan Teknologi Pertanian”, 12 Maret 2018., <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/03/12/p5g4ww328-partai-berkarya-fokus-kembangkan-teknologi-pertanian>, diakses pada 2 Oktober 2018.

<sup>78</sup><https://partaiperindo.com/?p=42320>, diakses pada 2 Oktober 2018.

<sup>79</sup> Tirto.id, “Strategi Partai-Partai Baru Lolos Ambang Batas Parlemen”, 25 Februari 2018, <https://tirto.id/strategi-partai-partai-baru-lolos-ambang-batas-parlemen-cFjt>, diakses pada 2 Oktober 2018.

<sup>80</sup> Okezone.com, “Harry Tanoe Caleg Perindo Punya Latar Belakang yang Beragam”, 17 Juli 2018, <https://news.okezone.com/read/2018/07/17/606/1923563/hary-tanoe-caleg-perindo-punya-latar-belakang-yang-beragam>; diakses pada 3 Oktober 2018. Juga Kompas.com, “Deretan Caleg Partai Berkarya dari Keluarga Cendana Hingga Artis Lawas”, 18 Juli 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/18/05442281/deretan-caleg-partai-berkarya-dari-keluarga-cendana-hingga-artis-lawas>, diakses pada 3 Oktober 2018.

Sementara mereka yang menggerakkan organisasi Partai Garuda sebagian pengurusnya berasal dari kalangan muda, atau berada sekitar usia 35 tahun.<sup>81</sup> Partai ini segmen dukungannya banyak berasal dari kalangan pedagang pasar. Bahkan sebagian kepengurusan di daerah merupakan pedagang pasar tradisional.<sup>82</sup> Pedagang pasar memang menjadi basis kader partai sehingga penjaringan kader banyak dilakukan partai ini dengan menjalin jejaring keluarga pedagang pasar.<sup>83</sup> Namun, segmentasi ini tidak membatasi partai untuk melakukan penjaringan kader yang luas dan terbuka bagi semua kalangan. Untuk menjawab ini partai memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang pesat dan Partai Garuda melakukan proses penjaringan kader secara online.<sup>84</sup> Namun demikian kecenderungan menyasar pada kalangan pedagang pasar tradisional menjadi hal yang diprioritaskan. Ketika menyeleksi para caleg, Partai Garuda menekankan pentingnya memperjuangkan pedagang pasar tradisional.<sup>85</sup>

Hubungan antara partai dan struktur sosial pada partai-partai baru tidak cukup terlihat.<sup>86</sup> Relasi historis antara partai dan struktur sosial yang berkembang dalam pembentukan partai kemudian tidak cukup menunjukkan bahwa partai-partai ini merupakan representasi dari kelompok sosial tertentu. Kenyataan ini memungkinkan analisis bahwa partai-partai baru tidak cukup memiliki basis sosial yang akan menjadi segmen pemilih loyal mereka. Dengan arti lain, partai-partai baru akan memperebutkan segmen pemilih yang bisa jadi sama antara satu dan lainnya. Ruang kompetisi dengan basis dukungan yang masih cair ini kemudian akan cenderung ditentukan seberapa jauh mesin partai bisa menarik simpati pemilih melalui program-program riil yang bisa dirasakan warga.

---

<sup>81</sup> Idntimes.com., 6 Maret 2018.

<sup>82</sup> Tribunnews.com, “Partai Garuda Terapkan Strategi Politik Gerilya Sunyi”, 20 Februari 2018, <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/20/partai-garuda-terapkan-strategi-politik-gerilya-sunyi?page=all>, diakses pada 3 Oktober 2018.

<sup>83</sup> Tirto.id, “Saat Jaringan Pedagang..,

<sup>84</sup> Tirto.id, “Saat Jaringan Pedagang..,

<sup>85</sup> Tirto.id, “Saat Jaringan Pedagang..,

<sup>86</sup> Vicky Randall, 2006, hlm. 392.

Perolehan suara partai di dua pemilu sebelumnya mengartikan bahwa tidak mudah bagi partai baru untuk merebut suara pemilih. Kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa suara pemilih cenderung direbut oleh partai-partai politik yang sudah mapan atau memiliki pengalaman sebagai peserta pemilu sebelumnya. Meskipun demikian, sisi lain dari kecenderungan tersebut juga memperlihatkan semakin tidak terkonsentrasi kekuatan-kekuatan partai atau sedikit kekuatan partai yang selama ini yang berhasil memperoleh suara. Sisi ini menawarkan cerminan semakin berkurangnya pula kemampuan retensi partai dalam menjaga loyalitas simpatisan pemilihnya.<sup>87</sup> Dari sisi inilah peluang perolehan suara partai baru belum sepenuhnya tertutup.

### Kepemimpinan Partai: Minus Figur “Kuat”

Kehadiran partai politik erat kaitannya dengan organisasi dan kepemimpinan partai, terutama ketika partai pada tahap awal tumbuh, yakni tahap identifikasi. Tahap identifikasi bagi partai baru yang penting adalah mengembangkan dan mengkomunikasikan pesannya. Sebuah partai baru bisa menarik pengikut karena ide, pemimpinnya atau karena kebaruan yang ditawarkan dan gaya organisasinya.<sup>88</sup> Di Indonesia, pertumbuhan partai era reformasi memperlihatkan institusionalisasi yang lemah, mekanisme internal partai yang tidak terlembaga, kerapnya perpecahan partai, dan partai-partai yang cenderung bersifat personalistik.<sup>89</sup> Sebagian partai yang tumbuh dan berkembang kemudian mengandalkan kepemimpinan personal atau figur kuat dengan karismanya untuk memobilisasi konstituen.<sup>90</sup> Para pendiri partai kemudian sebagian menjadi figur yang dominan dan diandalkan untuk menjadi penarik suara pemilih.

<sup>87</sup> Bastian Nainggolan dan Yohan Wahyu, 2016.

<sup>88</sup> Robert Harmel and Lars Svasand, 2007.

<sup>89</sup> Lihat Paige Johnson Tan, Indonesia Seven Years after Soeharto: Party System Institutionalization in a New Democracy, *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 28, No. 1 (April 2006): 88-114

<sup>90</sup> Ulla Fionna, “The Trap of Pop-Charisma for the Institutionalization of Indonesia’s Post-Suharto Parties”, *Asian Journal of Political Science*, (2016).

Keempat partai baru mencoba hadir dengan tidak menawarkan ketergantungan pada figur tertentu yang populer di masyarakat sebagai daya penarik massa. Figur yang biasanya dilekatkan pada posisi ketua umum pada masing-masing partai baru terlihat tidak memiliki basis sosial yang kuat di masyarakat. PSI dari awal mencoba membangun partai dengan tidak mau bertumpu pada seorang tokoh untuk mengangkat nama partai.<sup>91</sup> Partai Garuda baik pemimpin maupun pengurusnya juga belum banyak dikenal publik.<sup>92</sup> Sementara Partai Perindo, pemimpinnya Harry Tanoesoedibjo selama ini dikenal sebagai pengusaha media. Popularitas partai dilakukan salah satunya melalui iklan di televisi di jaringan usahanya.<sup>93</sup> Tanoe memang sudah berkecimpung dalam politik sebelum menjadi pemimpin Perindo. Sedangkan pemimpin Partai Berkarya Tommy Soeharto lebih diketahui publik sebagai anak mantan presiden kedua Indonesia.<sup>94</sup>

Kehadiran figur kuat dalam partai bisa memberikan kemungkinan implikasi. Di satu sisi, figur kuat yang berkarisma dan populer dalam jangka pendek bisa memberikan keuntungan partai salah satunya bisa menjadi daya tarik bagi preferensi pemilih.<sup>95</sup> Karena salah satu alasan yang mempengaruhi orang memilih partai politik tertentu adalah orientasi pemilih terhadap figur-figrur partai.<sup>96</sup> Tidak hanya itu, figur kuat dalam partai politik bisa menjadikannya sebagai figur perekat (*solidarity maker*) bagi elemen-elemen partai yang ada. Dengan kata lain, figur kuat bisa menciptakan soliditas internal,

<sup>91</sup> PSI.id, 26 Februari 2018.

<sup>92</sup> Kumparan.com, “Strategi Partai Garuda Dongkrak Popularitas Siapkan Program Rakyat”, 19 Februari 2018, <https://kumparan.com/@kumparannews/strategi-partai-garuda-dongkrak-popularitas-siapkan-program-rakyat>, diakses pada 3 Oktober 2018.

<sup>93</sup> Tempo.co, 19 Februari 2018...,

<sup>94</sup> Tempo.co, 19 Februari 2018...,

<sup>95</sup> Gian Vittorio Caprara, “The Personalization of Modern Politics”, *European Review*, Vol. 15, No. 2 (2007): 151–164.

<sup>96</sup> Hasil survei yang dilakukan oleh Charta Politika Indonesia pada periode 13-19 April 2018, memberi gambaran akan sejumlah alasan seseorang memilih partai politik pada Pemilu 2019 nanti, salah satunya karena alasan tokoh partai. Lihat dalam Era.id, “Beragam Alasan Orang Memilih Partai”, 21 Mei 2018, <https://www.era.id/read/OYUVX3-beragam-alasan-orang-memilih-partai>, diakses pada 3 Oktober 2018.

meminimalisir potensi perpecahan, dan hal ini sangat diperlukan bagi partai politik terutama dalam proses konsolidasi untuk persiapan menghadapi kompetisi elektoral. Namun, dalam jangka panjang partai akan berhadapan dengan proses institusionalisasi yang mengharuskan partai untuk membangun *platform* dan organisasi partai yang solid dan tidak menggantungkan pada figur tertentu.<sup>97</sup>

Dalam konteks itu, partai-partai baru yang di dalamnya tidak cukup menghadirkan figur-fiture yang menonjol dalam pengertian salah satunya memiliki latar belakang basis massa dan pengaruh yang kuat di akar rumput berpeluang untuk menggunakan strategi yang mengedepankan program partai daripada harus mengandalkan figur tertentu untuk menarik simpati. Persoalannya kemudian adalah bagaimana upaya partai baru bisa membuat strategi tersebut bisa ditangkap pemilih karena partai-partai baru juga berhadapan dengan tidak cukup memiliki waktu yang panjang mulai dari pendirian sampai ditetapkan sebagai peserta pemilu untuk mengenalkan program-program yang direncanakan. Kemungkinan untuk alternatif solusi tersebut salah satunya bisa menggunakan cara promosi lewat media massa atau media sosial ke masyarakat seperti yang dilakukan Partai Perindo yang sejauh ini telah gencar bersosialisasi atau beriklan di televisi yang memiliki jangkauan luas.<sup>98</sup> Serta PSI yang juga aktif melakukan kampanye melalui media sosial.<sup>99</sup>

Selain itu, pada Pemilu 2019 partai-partai baru akan menghadapi skema pemilu serentak di mana salah satu faktor yang bisa berpengaruh dalam perolehan elektoral adalah figur kandidat. Skema pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang serentak membuat partai politik mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden lebih awal. Tidak hanya itu, skema pemilu serentak juga dimungkinkan adanya asumsi munculnya efek ekor jas (*coattail effect*). Shugart misalnya

menerangkan, jika waktu penyelenggaraan pemilu presiden diserentakkan dengan pemilu legislatif akan menimbulkan efek ekor jas, yakni pemilihan presiden akan mempengaruhi hasil pemilihan anggota legislatif.<sup>100</sup>

Mark J Glantz sebagaimana dirujuk Kompas, mendefinisikan efek ekor jas sebagai kemampuan kandidat yang populer dalam menarik dukungan elektoral bagi kandidat lain dalam partai politik yang sama.<sup>101</sup> Kajian ilmiah akan efek ekor jas dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat, misalnya, memperlihatkan terdapat hubungan yang positif antara kekuatan elektoral seorang calon presiden dan partai yang mengusungnya.<sup>102</sup> Meskipun untuk kasus Indonesia masih prediktif, namun pencalonan dan dukungan bagi calon presiden oleh partai-partai tampaknya mempertimbangkan calon yang popular dan berupaya membangun asosiasi dengan calon.

Regulasi pemilu menyatakan untuk mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden partai politik atau gabungan partai harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit dua puluh persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh dua puluh lima persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.<sup>103</sup> Dengan demikian partai-partai baru tidak bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden, melainkan hanya sebatas mendukung pasangan calon. Kemungkinan munculnya insentif elektoral akan efek ekor jas dalam skema pemilu serentak membuat partai-partai peserta pemilu telah menyatakan sikap masing-masing.<sup>104</sup> Hal yang juga dilakukan sejumlah partai baru.

<sup>97</sup> Ulla Fionna, "The Trap of Pop-Charisma..,"

<sup>98</sup> Tirto.id, "Menancapkan Mars Perindo Lewat Stasiun TV Miliki Pribadi", 15 Februari 2006, <https://tirto.id/menancapkan-mars-perindo-lewat-stasiun-tv-milik-pribadi-nn>, diakses pada 3 Oktober 2018.

<sup>99</sup> Kumparan.com, 19 Februari 2018..,

<sup>100</sup> Syamsuddin Haris, (Ed). *Pemilu Serentak 2019*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 32.

<sup>101</sup> Kompas.id, "Menakar Dampak Ekor Jas Ke Elektabilitas", 12 Agustus 2018, <https://kompas.id/baca/polhuk/2018/08/12/menakar-dampak-ekor-jas-ke-elektabilitas/>, diakses pada 22 September 2018.

<sup>102</sup> Djayadi Hanan, Efek Ekor Jas, *Harian Kompas*, 8 Februari 2018.

<sup>103</sup> Lihat Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>104</sup> Djayadi Hanan, Efek Ekor Jas, *Harian Kompas*, 8 Februari 2018.

Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bakal bersaing adalah pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amien dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dua partai baru, Perindo dan PSI telah menyatakan sikap mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.<sup>105</sup> Partai Berkarya memilih mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.<sup>106</sup> Sementara Partai Garuda menyatakan tidak mendukung pasangan capres.<sup>107</sup> Dengan mendukung pasangan capres asumsinya partai-partai secara elektoral akan memperoleh insentif suara. Karena keterpilihan kandidat dimungkinkan membantu keterpilihan partai. Besar kecilnya pengaruh efek ekor jas terhadap partai akan tergantung pada seberapa kuat dan efektif upaya partai mengasosiasikan diri dengan calon presiden.<sup>108</sup> Namun demikian, kemungkinan efek ekor jas masih menjadi teka-teki yang berkemungkinan muncul dan sebaliknya untuk konteks Indonesia yang baru pertama kali menyelenggarakan pemilu serentak.<sup>109</sup>

## Penutup

Partai-partai baru peserta Pemilu 2019 muncul dengan latar belakang, di antaranya ingin menghadirkan alternatif pilihan kepada warga untuk menyalurkan aspirasi politik. Alternatif pilihan ini muncul juga dilatari dengan kekecewaan terhadap partai politik yang ada.

<sup>105</sup> Tirto.id, “PSI Ungkap Alasan Tetap Dukung Jokowi Meski Cawapres Bukan Mahfud”, 11 Agustus 2018, <https://tirto.id/psi-ungkap-alasan-tetap-dukung-jokowi-meski-cawapres-bukan-mahfud-cRNg>, diakses pada 4 Oktober 2018. Juga, Okezone.com, “Dukung Jokowi-Ma'ruf Perindo Terus Gaungkan Persatuan dan Kesatuan Indonesia”, 10 Agustus 2018, <https://news.okezone.com/read/2018/08/10/605/1934595/dukung-jokowi-ma-ruf-perindo-terus-gaungkan-persatuan-dan-kesatuan-indonesia>, diakses pada 4 Oktober 2018.

<sup>106</sup> Viva.co.id, “Alasan Partai Berkarya Dukung Prabowo Sandi”, 10 Agustus 2018, <https://www.viva.co.id/berita/politik/1063643-alasan-partai-berkarya-dukung-prabowo-sandi>, diakses pada 4 Oktober 2018.

<sup>107</sup> Detik.com, “Tak Dukung Satupun Capres Partai Garuda: Kami Fokus di Pileg”, 11 Agustus 2018, <https://news.detik.com/berita/4162036/tak-dukung-satu-pun-capres-partai-garuda-kami-fokus-di-pileg>, diakses 4 Oktober 2018.

<sup>108</sup> Djayadi Hanan, Efek Ekor Jas, *Harian Kompas*, 8 Februari 2018.

<sup>109</sup> Kompas.id, “Menakar Dampak Ekor Jas..,

Dengan ambang batas parlemen yang ditetapkan sebesar 4 persen, keikutsertaan partai baru untuk bersaing dengan partai-partai yang sudah relatif mapan menjadi tidak mudah. Partai-partai baru muncul dengan kesamaan corak ideologi nasionalis dan terbuka bagi semua kalangan. Perbedaan di antara mereka dari sudut ini terlihat tidak terlalu mencolok. Hal yang membuat basis dukungan pemilih masing-masing partai juga cair. Kelenturan ini membuat prospek mereka untuk mendapatkan simpati elektoral dari pemilih cukup terbuka. Meskipun sebagian partai mencoba menempatkan segmen pemilih dengan melihat latar belakang seperti usia, pekerjaan, latar belakang sosial ekonomi dan sebagainya, namun partai baru terlihat kemudian membatasi diri untuk meraih pasar pemilih yang lebih luas.

Sebagai partai baru, tantangan yang dihadapi dalam pemilu adalah bagaimana dengan waktu yang ada untuk sosialisasi, kemudian partai-partai ini bisa menjadi rujukan alternatif bagi pemilih untuk menentukan pilihan di pemilu. Dengan infrastruktur mesin partai yang ada untuk sosialisasi di lapangan, ditambah dengan peluang penggunaan media massa atau sosial, hal seperti itu bisa menjadi salah satu cara partai untuk mengenalkan diri. Hanya saja, keempat partai baru cenderung tidak memiliki figur kuat yang memiliki dukungan karisma pribadi yang bisa menjadi penarik massa. Kekurangan seperti ini bisa dimungkinkan menjadi suatu kelebihan jika partai kemudian menawarkan kepada pemilih yang berbasis gagasan atau program sehingga menjadi tidak tergantung pada figur tertentu untuk merebut simpati. Dengan demikian, pencapaian partai akan banyak ditentukan oleh mesin organisasi, kader partai, dan bagaimana strategi mereka menawarkan program yang dapat dijadikan tawaran kepada pemilih mengapa harus menjatuhkan pilihan kepada partai baru.

## Daftar Pustaka

### Buku

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo.

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PSI.

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Garuda.

- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya.
- Bolleyer, Nicole. *New Parties in Old Party Systems Persistence and Decline in Seventeen Democracies*, Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Dhakidae, Daniel. "Partai-Partai Politik di Indonesia: Kisah Pergerakan dan Organisasi dalam Patahan-Patahan Sejarah," dalam Tim Penelitian dan Pengembangan (Tim Litbang) Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi, Strategi, dan Program*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Dhakidae, Daniel. Pengantar dalam *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.
- Haris, Syamsuddin (Ed). *Pemilu Serentak 2019*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Katz, Richard S. dan William Crotty (Eds.), *Handbook of Party Politics*, London: Sage Publications, 2006.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Nainggolan, Bastian dan Yohan Wahyu. *Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016.
- Nurhasim, Moch. "Masa Depan Partai Islam Era Reformasi: Sebuah Perspektif Analisis dalam Moch. Nurhasim (ed), *Masa Depan Partai Islam di Indonesia: Studi tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor-Faktor Penyebabnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Vassallo, Francesca and Clyde Wilcox. "Party as a Carrier of Ideas" dalam Richard S Katz. dan William Crotty (Eds.), *Handbook of Party Politics*, London: Sage Publications, 2006.
- White, John Kenneth. "What is Political Party?", dalam Richard S Katz. and William Crotty (Eds.), *Handbook of Party Politics*, London: Sage Publications, 2006.
- Bolin, Niklas. New Party Parliamentary Entry in Western Europe, 1960-2010, *European Journal of Government and Economics*, Volume 3, Number 1 (2014).
- Bolleyer, Nicole and Evelyn Bytzek. New Party Performance after Breakthrough: Party Origin, Building and Leadership, *Party Politics* (2006).
- Fionna, Ulla. The Trap of Pop-Charisma for the Institutionalization of Indonesia's Post-Suharto Parties, *Asian Journal of Political Science* (2016).
- Haris, Syamsuddin, dkk. Pemilu Nasional Serentak 2019, *Position Paper*, Electoral Research Institute-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2015.
- Harmel, Robert and John D. Robertson. Formation and Success of New Parties : A Cross-National Analysis, *International Political Science Review*, Vol 6, No. 4 (1985). Harmel, Robert and Lars Svasand. Party Leadership and Party Institutionalisation: Three Phases of Development, *West European Politics*, 16, 2 (2007).
- Harmel, Robert. On the Study of New Parties, *International Political Science Review*, Vol 6, No. 4 (1985).
- Ignazi, Piero. The Crisis of Parties and the Rise of New Political Parties, *Party Politics*, Vol. 2. No. 4 (1996).
- Johnson Tan, Paige. Indonesia Seven Years after Soeharto: Party System Institutionalization in a New Democracy, *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 28, No. 1 (2006). Lago, Ignacio and Ferran Martínez, Why New Parties?, *Party Politics*, Vol. 17, No. 1 (2011).
- Lucardie, Paul. Prophets, Purifiers and Prolocutors: Towards a Theory on the Emergence of New Parties, *Party Politics*, Vol. 6. No.2 (2000).
- Poguntke, Thomas. New Politics and Party Systems: The Emergence of a New Type of Party?, *West European Politics*, 10, 1 (1987).
- Sikk, Allan. Newness as a Winning Formula for New Political Parties, *Party Politics*, 18, 4 (2011).
- Tavits, Margit. Party System Change: Testing a Model of New Party Entry, *Party Politics*, Vol.12, No. 1 (2006)..
- Ufen, Andreas. Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between *politik aliran* and 'Philippinisation', *GIGA Working Papers*, No. 37, GIGA German Institute of Global and Area Studies, 2006.
- Vittorio Caprara, Gian. "The Personalization of Modern Politics", *European Review*, Vol. 15, No. 2 (2007).

## Jurnal

- Barnea, Shlomit and Gideon Rahat. 'Out With the Old, in With the "New": What Constitutes a New Party?', *Party Politics*, 17, 3 (2010). Bolin, Niklas. "New Party Entrance – Analyzing the Impact of Political Institutions", *Umeå Working Papers in Political Science*, Department of Political Science, Umeå University, Umeå, Sweden, No. 2 (2007).

Zúborová, Viera. Newcomers in Politics? the Success of New Political Parties in the Slovak and Czech Republic after 2010?, *Baltic Journal of Law and Politics*, 8, 2 (2015).

### Sumber Cetak dan Online

Alfian, Alfan. Mengapa Parpol Baru?, *Harian Kompas*, 27 Agustus 2015.

Detik.com, "Seluruh Keluarga Cendana Akhirnya Berlabuh di Partai Berkarya", 21 Juli 2018, dalam <https://news.detik.com/berita/4125828/seluruh-keluarga-cendana-akhirnya-berlabuh-di-partai-berkarya>. Detik.com, "Tak Dukung Satupun Capres Partai Garuda: Kami Fokus di Pileg", 11 Agustus 2018 dalam <https://news.detik.com/berita/4162036/tak-dukung-satu-pun-capres-partai-garuda-kami-fokus-di-pileg>. Era.id, "Beragam Alasan Orang Memilih Partai", 21 Mei 2018 dalam <https://www.era.id/read/OYUVX3-beragam-alasan-orang-memilih-partai>.

Hanan, Djayadi. Efek Ekor Jas, *Harian Kompas*, 8 Februari 2018.

Hanan, Djayadi. Berebut Milenial, *Harian Kompas*, 28 Agustus 2018.

<Https://psi.id/berita/content/cita-cita-psi/>.

<Https://www.berkarya.id/kepartaian.php#main>.

<Https://partaiperindo.com/?p=56358>. <Https://partaiperindo.com/?p=42320>.

Idntimes.com, "Mengenal Perindo Partai Baru Peserta Pemilu", 3 Maret 2018 dalam <https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/mengenal-perindo-partai-baru-peserta-pemilu-1/full>.

Idntimes.com, "Mengenal Partai Garuda Partai yang Digerakkan Millenials", 6 Maret 2018 dalam <https://www.idntimes.com/news/indonesia/vanny-rahman/mengenal-partai-garuda-partai-yang-digerakkan-millennials-1/full>.

Idntimes.com, "Semua Hal Tentang Berkarya Partai Baru Bagi Yang Rindu Orde Baru", 3 Maret 2018 dalam <https://www.idntimes.com/news/indonesia/linda/semuahal-tentang-berkarya-partai-baru-bagi-yang-rindu-orde-baru-1/full>.

Katadata.co, "Lebih Dari Separuh Caleg PSI Dari Kalangan Muda Profesional", 17 Juli 2018 dalam <https://katadata.co.id/berita/2018/07/17/lebih-dari-separuh-caleg-psi-dari-kalangan-muda-profesional>.

Khaliq Ahmad, Abdul "Mengenal Platform Partai Perindo", 6 Februari 2015, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/960819/18/mengenal-platform-partai-perindo-1423193546>.

Kompas.id, "Kursi DPR menjadi 575", 31 Mei 2017, dalam <https://kompas.id/baca/polhuk/politik/2017/05/31/kursi-dpr-menjadi-575>.

Kompas.com, "Partai Perindo dan Penantiannya di Pemilu 2019", 22 Februari 2018 dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/08292081/partai-perindo-dan-penantiannya-di-pemilu-2019>.

Kompas.com, PSI, Grace Natalie dan Citra Partai Anak Muda", 22 Februari 2018 dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/12132451/psi-grace-natalie-dan-citra-partai-anak-muda>.

Kompas.com, "Berkarya Anggap Sistem Pemerintahan Soeharto dan Orde Baru Masih Relevan", 15 Juli 2018 dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/15/15140461/berkarya-anggap-sistem-pemerintahan-soeharto-dan-orde-baru-masih-relevant>.

Kompas.com, Garuda Partai Baru yang Memulai Jejak Perdananya di Pemilu 2019", 21 Februari 2018 dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/21/16125861/garuda-partai-baru-yang-memulai-jejak-perdananya-di-pemilu-2019>.

Kompas.com, "Deretan Caleg Partai Berkarya dari Keluarga Cendana Hingga Artis Lawas", 18 Juli 2018 dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/18/05442281/deretan-caleg-partai-berkarya-dari-keluarga-cendana-hingga-artis-lawas>.

Kompas.id, "Menakar Dampak Ekor Jas Ke Elektabilitas", 12 Agustus 2018 dalam <https://kompas.id/baca/polhuk/2018/08/12/menakar-dampak-ekor-jas-ke-elektabilitas>.

Kumparan.com, "Mengenal PSI Partai Milenial Peserta Baru di Pemilu 2019", 19 Februari 2018 dalam <https://kumparan.com/@kumparannews/mengenal-psi-partai-milenial-peserta-baru-di-pemilu-2019>.

Kumparan.com, "Partai Garuda Bergerak dalam Senyap", 19 Februari 2019 dalam <https://kumparan.com/@kumparannews/partai-garuda-bergerak-dalam-senyap-untuk-bersaing-di-2019>.

Kumparan.com, "PSI Fokus Kampanye di Media Sosial Demi Dulang Suara di Pileg 2019", 19 Februari 2018 dalam <https://kumparan.com/@kumparannews/psi-fokus-kampanye-di-media-sosial-demi-dulang-suara-di-pileg-2019>.

Kumparan.com, "Strategi Partai Garuda Dongkrak Popularitas Siapkan Program Rakyat", 19 Februari 2018 dalam <https://kumparan.com/@kumparannews/strategi-partai-garuda-dongkrak-popularitas-siapkan-program-rakyat>.

- Liputan6.com, “Partai Berkarya Parpol Baru Rasa Era Soeharto”, 26 Agustus 2018 dalam <https://www.liputan6.com/pileg/read/3628248/partai-berkarya-parpol-baru-rasa-era-soeharto>.
- Okezone.com, “Harry Tanoe Caleg Perindo Punya Latar Belakang yang Beragam”, 17 Juli 2018 dalam <https://news.okezone.com/read/2018/07/17/606/1923563/hary-tanoe-caleg-perindo-punya-latar-belakang-yang-beragam>.
- Okezone.com, “Dukung Jokowi-Ma’ruf Perindo Terus Gaungkan Persatuan dan Kesatuan Indonesia”, 10 Agustus 2018 dalam <https://news.okezone.com/read/2018/08/10/605/1934595/dukung-jokowi-ma-ruf-perindo-terus-gaungkan-persatuan-dan-kesatuan-indonesia>.
- PSI.id, “Pembentukan Partai PSI Berawal dari Obrolan di Kafe”, 26 Februari 2018 dalam <https://psi.id/berita/2018/02/26/pembentukan-partai-psi-berawal-dari-obrolan-di-kafe>.
- Republika.co.id, Partai Berkarya Fokus Kembangkan Teknologi Pertanian”, 12 Maret 2018 dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/03/12/p5g4ww328-partai-berkarya-fokus-kembangkan-teknologi-pertanian>.
- Tempo.co.id, “Empat Partai Baru di Pemilu 2019”, 19 Februari 2018 dalam <https://nasional.tempo.co/read/1062006/empat-partai-baru-di-pemilu-2019-dan-kekuatan-pendirinya/full&view=ok>.
- Tempo.co, ”, “Partai Berkarya Adopsi Program Soeharto Jaring Suara Pemilu 2019”, 16 Juni 2018 dalam <https://nasional.tempo.co/read/1098518/partai-berkarya-adopsi-program-soeharto-jaring-suara-pemilu-2019/full&view=ok>.
- Tirto.id, “Menancapkan Mars Perindo Lewat Stasiun TV Miliki Pribadi”, 15 Februari 2006 dalam <https://tirto.id/menancapkan-mars-perindo-lewat-stasiun-tv-milik-pribadi-nn>.
- Tirto.id, “Strategi Partai-Partai Baru Lolos Ambang Batas Parlemen”, 25 Februari 2018 dalam <https://tirto.id/strategi-partai-partai-baru-lolos-ambang-batas-parlemen-cFjt>.
- Tirto.id, “Metamorfosis Partai Garuda Dari Harmoko ke Big Data”, 20 Juni 2018 dalam <https://tirto.id/metamorfosis-partai-garuda-dari-harmoko-ke-big-data-cMzw>.
- Tirto.id, “Saat Jaringan Pedagang Ingin Punya Partai Lahirlah Partai Garuda,” 20 Juni 2018, dalam <https://tirto.id/saat-jaringan-pedagang-ingin-punya-partai-lahirlah-partai-garuda-cMzx>.
- Tirto.id, “PSI Ungkap Alasan Tetap Dukung Jokowi Meski Cawapres Bukan Mahfud”, 11 Agustus 2018 dalam <https://tirto.id/psi-ungkap-alasan-tetap-dukung-jokowi-meski-cawapres-bukan-mahfud-cRNg..>
- Tribunnews.com, “Partai Garuda Terapkan Strategi Politik Gerilya Sunyi”, 20 Februari 2018 dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/20/partai-garuda-terapkan-strategi-politik-gerilya-sunyi?page=all>.
- Viva.co.id, “Alasan Partai Berkarya Dukung Prabowo Sandi”, 10 Agustus 2018 dalam <https://www.viva.co.id/berita/politik/1063643-alasan-partai-berkarya-dukung-prabowo-sandi>.

## TENTANG PENULIS

### Aisah Putri Budiatri

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui [aisahputrib@gmail.com](mailto:aisahputrib@gmail.com).

### Agus Sutisna

Penulis merupakan dosen di FISIP Universitas Muhamamdiyah Tangerang. Menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Nasional, Jakarta. Saat ini penulis menjadi anggota KPU Provinsi Banten periode 2018-2023. Aktif menulis tentang kepemiluan dan demokrasi di berbagai jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: [tisna\\_1965@ymail.com](mailto:tisna_1965@ymail.com).

### Firman Noor

Penulis merupakan peneliti senior sekaligus professor riset pada Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Indonesia, S2 di Australian National University dan S3 di Universitas Exeter, Inggris. Karyakarya akademisnya banyak diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional maupun buku terkait kepemiluan dan partai politik. Penulis dapat dihubungi melalui Email: [firman.noor@yahoo.co.id](mailto:firman.noor@yahoo.co.id).

### Idil Akbar

Penulis merupakan dosen di FISIP Universitas Padjajaran, Bandung. Menyelesaikan pendidikan master Ilmu Politik di FISIP Universitas

Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: [idil.akbar@gmail.com](mailto:idil.akbar@gmail.com)

### Kurniawati Hastuti Dewi

Penulis adalah peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2007 menyelesaikan program master dari Faculty of Asian Studies Australian National University dan mendapat gelar doktor dari Kyoto University Jepang tahun 2012. Memiliki passion dalam bidang gender dan politik, kepemimpinan perempuan, gender dan desentralisasi, hak-hak asasi perempuan dan anak serta gender, Islam dan demokrasi di Indonesia. Berbagai tulisan akademis telah diterbitkan dalam jurnal nasional, internasional dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: [kurniawati.dewi@yahoo.com](mailto:kurniawati.dewi@yahoo.com).

### Lili Romli

Penulis merupakan peneliti senior dan professor riset di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menyelesaikan pendidikan doctoral ilmu politik di FISIP Universitas Indonesia. Kajian yang diminati penulis adalah tentang kepemiluan dan partai politik. Penulis dapat dihubungi melalui: email: [liliromli.lipi@gmail.com](mailto:liliromli.lipi@gmail.com)

### M. Fajar Shodiq Ramadlan

Penulis merupakan pengajar pada Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Brawijaya. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Airlangga, Surabaya. Beberapa karya tulisnya tentang kepemiluan telah dimuat dalam berbagai jurnal. Penulis dapat dihubungi melalui email: [fajarramadlan@ub.ac.id](mailto:fajarramadlan@ub.ac.id).

### Moch Nurhasim

Adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pendidikan S2 diselesaikan di Universitas

Indonesia. Berbagai kajian seputar kepemiluan, partai politik, parlemen dan pilkada telah dihasilkan dalam bentuk jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: hasim\_nur@yahoo.com.

### **Mouliza K.D Sweinstani**

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 2018. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro dan S2 di Universitas Indonesia. Sebelumnya bekerja di Bawaslu RI. Kajian yang diminati penulis antara lain: gender dan politik dan kepemiluan. Penulis dapat dihubungi melalui email: moulizadonna@gmail.com.

### **Romel Masykuri**

Penulis merupakan mahasiswa program magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga. Dapat dihubungi melalui email: romel.masykuri@gmail.com

### **Ridho Imawan Hanafi**

Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Menyelesaikan S1 Jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya. Melanjutkan S2 di Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia. Sebelum di LIPI, penulis bekerja sebagai peneliti di Soegeng Sarjadi Syndicate, Jakarta (2008-2014). Kajian yang diminati adalah demokrasi, partai politik, dan pemilu. Penulis dapat dihubungi melalui surel ridhoimawan@gmail.com.

### **Sri Budi Eko Wardani**

Penulis adalah pengajar di departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia. Penulis menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3 di Universitas Indonesia. Pernah menjadi Direktur Eksekutif Puskapol UI. Kajian peminatan penulis adalah tentang kepemiluan, perempuan dan perwakilan politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: sbe\_wardani@yahoo.com.

### **Sri Yanuarti**

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana Ilmu Politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru diterbitkan antara lain: Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia, Tentara yang Gelisah, Tentara Mendamba Mitra, Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru, Beranda Perdamaian, Problematika Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua), Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan, Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003- 2004, dan Hubungan Sipil Militer Era Megawati. Kajian kepolisian di antaranya: Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal; Evaluasi Reformasi Polri dan lain- lain. Selain kajian tentang pertahanan dan keamanan, Sri Yanuarti juga aktif menulis kajian tentang konflik antara lain: Konflik di Maluku & Maluku Utara: Strategi Penyelesaian Konflik Jangka Panjang, Capacity Building: Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Tingkat Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku; Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sumbawa; Kerangka Pencegahan Konflik Komunal di Indonesia, dan lain-lain. Ia dapat dihubungi melalui surel yanuc2000@yahoo.com.

# Informasi Hasil Penelitian Terpilih

